



KISAH SUKSES

Era Baru Layanan Informasi Publik Pengadilan Negeri di Indonesia



Keterangan gambar: Staf informasi publik di PN Singkawang membantu masyarakat mengakses informasi perkara dari Case Tracking System (CTS) pengadilan. Ketua Pengadilan PN Singkawang IGAB Komang Wijaya terus memonitor dan memotivasi stafnya untuk implementasi CTS, serta membantu mengembangkan strategi dalam mengatasi berbagai kendala yang ditemui. Contohnya, Ketua Pengadilan telah bekerja sama dengan penyedia jasa internet dan listrik pengadilan untuk memastikan kestabilan jaringan dan keandalan dukungan.

“Pengadilan negeri kita harus meningkatkan pelayanan publiknya. Oleh karena itu, kami mengoptimalkan penggunaan teknologi.”

Suharno, Ketua Pengadilan, Pengadilan Negeri Bangkinang

Dahulu, untuk mendapatkan informasi perkara di pengadilan umum di Indonesia memerlukan proses panjang untuk menemukan orang yang dengan waktu dan informasi yang tepat, dan kita hanya bergantung pada informasi yang diberikan. Dalam sistem peradilan paling progresif di Indonesia, kini saatnya untuk era baru pelayanan publik.

Terhitung sejak 2012, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengadopsi standar baru dalam pelayanan publik. Pengadilan umum diminta untuk menyiapkan Meja Informasi Publik yang dilengkapi dengan komputer serta petugas profesional yang memfasilitasi akses cepat terhadap data pengadilan. Masyarakat kini hanya perlu datang ke pengadilan dan bertemu dengan petugas yang terlatih dan ramah untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Masyarakat juga dapat mengakses data perkara publik melalui sistem informasi berbasis web milik pengadilan dengan bantuan petugas di Meja Informasi Publik.

Pengadilan seperti Pengadilan Negeri (PN) Singkawang di Kalimantan Barat, PN Bangkinang di Riau, PN Klaten di Jawa Tengah dan PN Surabaya di Jawa Timur adalah model-model pengadilan dalam era baru pelayanan publik. Layanan ini dimungkinkan berkat komitmen Mahkamah Agung dalam menjalankan pelayanan publik dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau *Case Tracking System* (CTS) yang menyediakan informasi berbasis web kepada masyarakat tentang jadwal sidang, majelis hakim, status perkara, bahkan biaya pengelolaan perkara. Manfaat CTS ini dapat dirasakan tidak hanya oleh para pencari keadilan, tetapi juga wartawan, mahasiswa serta masyarakat umum.

Reformasi ini tidak berhenti di CTS. PN Bangkinang dan PN Klaten telah mengembangkan sistem pelaporan melalui SMS yang memungkinkan permintaan informasi tentang perkara melalui SMS. Sementara itu, PN Singkawang telah menerapkan “one stop service” yang memungkinkan pendaftaran perkara dan pembayaran biaya sidang melalui Meja Informasi Publik. Di PN Surabaya, petugas di Meja Informasi Publik selalu siap melayani setiap hari selama jam kerja pengadilan dengan seragam yang mudah dikenali.

Ketua pengadilan seperti Ketua PN Bangkinang, Suharno dan Panitera/Sekretaris, N. Sagala terus memotivasi karyawannya agar selalu menjaga keterbaharuan informasi di CTS. “Para hakim dan panitera meluangkan waktu setelah jam kerja untuk mengunggah informasi ke dalam CTS bersama-sama,” ujar N. Sagala. Ketua PN Singkawang IGAB Komang Wijaya menyampaikan strategi sukses pelayanan informasi publik di pengadilanannya, “Pelaksanaan CTS bersama dengan pemberian layanan di Meja Informasi Publik memungkinkan keterbukaan informasi dan sistem peradilan yang lebih akuntabel.”

Proyek C4J adalah proyek empat tahun yang didanai USAID, dan dilaksanakan oleh Chemonics International. C4J bekerja sama dengan Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan masyarakat guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan Indonesia. Proyek ini dimulai bulan Mei 2010, dan akan berjalan hingga Mei 2015. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi: Mr. Dondy Sentya, USAID Senior Rule of Law Specialist, atau info@chemonics.com, atau www.c4j-indonesia.org